

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016. Rencana pembangunan jangka menengah tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja organisasi perangkat daerah. Dengan mengacu kepada RPJMD, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah telah menyusun rencana strategis tahun 2016-2021 dan perubahan rencana strategis tahun 2016-2021 yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah organisasi perangkat daerah BKPPD.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing”. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten di dalam rencana strategis tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Manajemen Kepegawaian Daerah Yang Akuntabel, Berintegritas dan Profesional”.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pada tahun 2018 dilakukan perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPPD.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2018 adalah:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. adanya penambahan dan pengurangan kegiatan;
- c. adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja.

## 1.2 LANDASAN HUKUM RENJA

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Serta Tatacara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD dan Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten;

16. Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 050/330/31 perihal Pedoman Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1. Maksud

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan.

#### 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2018 adalah:

- a. menjadi pedoman dan dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2018;
- b. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- c. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2018 disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan BKPPD di triwulan IV tahun 2018 mulai dari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan BKPPD 2018 sampai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BKPPD 2018.

### **1.4 SISTEMATIKA**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II. Evaluasi Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### Bab III. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

#### Bab IV. Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)**

#### **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH**

#### **SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten adalah melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten mengemban Fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai wujud Komitmen Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten dalam mengemban fungsi di atas, maka setiap awal tahun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten membuat perjanjian kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja. Dengan penetapan Kinerja tersebut diharapkan tolok ukur pencapaian kinerja yang direncanakan dan telah dilaksanakan akan dapat dinilai secara akuntabel.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan pencapaian perencanaan Strategis (renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018**  
**KABUPATEN KLATEN**

**URUSAN** : 4.05 URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN

**SKPD** : 4.05.01 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PADA TAHUN LALU (2017)		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN (DPA) TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2018)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN S/D TRIWULAN II		TINGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN S/D TRIWULAN II RENJA PD YANG DIEVALUASI (%)		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2018		TINGKAT REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TRIWULAN II TAHUN 2018 (%)		KET
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
4.01.4.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.653	586.000.000	4.276	561.479.747	10.481	431.000.000	5.407	174.320.060	52	40	9.683	735.799.807	542	790	
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	8850	20.000.000	4208	21.000.000	8.850	20.000.000	4.388	6.750.000	50	34	8.596	27.750.000	97	139	
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang tersedia di BKPPD	71	46.000.000	12	63.443.350	71	46.000.000	71	20.677.200	100	45	83	84.120.550	117	183	
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10	55.000.000	12	58.401.250	10	50.000.000	10	5.590.000	100	11	22	63.991.250	220	116	
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	2200	90.000.000	20	84.653.000	1.260	75.000.000	786	28.350.000	62	38	806	113.003.000	37	126	
4.01.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD keluar daerah	222	325.000.000	12	299.082.147	111	200.000.000	92	95.402.860	83	48	104	394.485.007	47	121	

4.01.4.05.01.01.1 9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	300	50.000.000	12	34.900.000	179	40.000.000	60	17.550.000	34	44	72	52.450.000	24	105
<b>4.01.4.05.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>127</b>	<b>294.000.000</b>	<b>117</b>	<b>199.639.438</b>	<b>122</b>	<b>222.000.000</b>	<b>80</b>	<b>112.587.890</b>	<b>66</b>	<b>51</b>	<b>197</b>	<b>312.227.328</b>	<b>963</b>	<b>499</b>
4.01.4.05.01.02.0 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	3	40.000.000	6	21.150.000	3	20.000.000	3	18.425.000	100	92	9	39.575.000	300	99
4.01.4.05.01.02.0 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	7	70.000.000	9	71.531.924	5	50.000.000	5	48.989.075	100	98	14	120.520.999	200	172
4.01.4.05.01.02.2 4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	19	70.000.000	19	50.711.582	17	65.000.000	11	15.924.215	65	24	30	66.635.797	158	95
4.01.4.05.01.02.2 6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12	24.000.000	12	6.630.660	12	12.000.000	7	3.960.100	58	33	19	10.590.760	158	44
4.01.4.05.01.02.2 8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	85	85.000.000	71	49.615.272	85	75.000.000	54	25.289.500	64	34	125	74.904.772	147	88
4.01.4.05.01.02.2 9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur		1	5.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.01.4.05.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Triwulan Tepat Waktu</b>	<b>4</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1</b>	<b>2.893.500</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>2.893.500</b>	<b>25</b>	<b>58</b>
4.01.4.05.01.06.0 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	4	5.000.000	1	2.893.500	1	5.000.000	0	0	0	0	1	2.893.500	25	58
<b>4.01.4.05.01.27</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Renstra PD dan Renja PD tepat waktu</b>	<b>3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3</b>	<b>13.704.500</b>	<b>3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3</b>	<b>585.000</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>14.289.500</b>	<b>100</b>	<b>71</b>

4.01.4.05.01.27.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Perubahan 2017 & 2018 mumi) yang disusun dengan baik	2	5.000.000	2	4.033.500	2	5.000.000	0	0	0	0	2	4.033.500	100	81
4.01.4.05.01.27.0 2	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	25	15.000.000	28	9.671.000	5	15.000.000	14	585.000	280	4	42	10.256.000	168	68
4.01.4.05.01.29	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya paratur</b>	<b>Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat II</b>	<b>2</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat III</b>	<b>30</b>		<b>8</b>		<b>30</b>		<b>8</b>		<b>27</b>		<b>35</b>		<b>116</b>	
		<b>Jumlah PNS yang Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</b>	<b>40</b>		<b>11</b>		<b>40</b>		<b>32</b>		<b>80</b>		<b>91</b>		<b>228</b>	
		<b>Jumlah PNS yang berprestasi yang mendapatkan satya lencana</b>	<b>75</b>		<b>20</b>		<b>75</b>		<b>196</b>		<b>261</b>		<b>281</b>		<b>375</b>	
		<b>Jumlah PNS yang mendapat pembekalan pensiun</b>	<b>100</b>		<b>40</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>540</b>		<b>540</b>	
		<b>Jumlah PNS yang diklat teknis tugas dan fungsi</b>	<b>148</b>		<b>96</b>		<b>148</b>		<b>208</b>		<b>141</b>		<b>237</b>		<b>160</b>	
		<b>Jumlah PNS yang diklat fungsional</b>	<b>100</b>		<b>0</b>		<b>100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
4.01.4.05.01.29.0 1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	125	500.000.000	-	0	125	500.000.000	121	29.119.900	97	6	121	29.119.900	97	6
4.01.4.05.01.29.0 2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	50	1.625.000.000	19	788.348.100	50	1.625.000.000	31	532.857.500	62	33	50	1.321.205.600	100	81

4.05.4.05.01.29.03	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	300	1.500.000.000	165	934.556.237	250	1.020.000.000	208	664.078.538	83	65	373	1.598.634.775	124	107
4.01.4.05.01.29.04	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	400	600.000.000	96	510.279.261	302	330.000.000	60	64.866.936	20	20	156	575.146.197	39	96
4.01.4.05.01.29.06	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.05.4.05.01.29.07	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	Bintek Perundang-undangan Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	80	90.000.000	80	64.881.500	0	-	0	-	0	-	80	64.881.500	100	72
<b>4.01.4.05.01.30</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Pemutakhiran Data PNS yang update</b>	<b>12.980</b>		<b>10.754</b>		<b>12.980</b>	<b>2.622.000.000</b>	<b>5.371</b>		<b>41</b>		<b>16.125</b>		<b>124</b>	
		<b>Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin dan Perceraian</b>	<b>59</b>		<b>20</b>		<b>59</b>		<b>16</b>		<b>27</b>		<b>36</b>		<b>61</b>	
		<b>Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS</b>	<b>1.700</b>		<b>1.264</b>		<b>1.700</b>		<b>700</b>		<b>41</b>		<b>1.964</b>		<b>116</b>	
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Data Kepangkatan PNS	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah ASN yang ditempatkan	2.000	750.000.000	320	212.532.663	2.000	600.000.000	1.090	165.070.418	55	28	1.410	377.603.081	71	50
4.01.4.05.01.30.05	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat	5	150.000.000	2	49.838.624	2	60.000.000	2	57.096.444	100	95	4	106.935.068	80	71
4.01.4.05.01.30.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana	75	22.000.000	20	16.442.545	75	22.000.000	196	11.764.828	261	53	216	28.207.373	288	128



4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan	34	120.000.000	20	117.998.831	34	120.000.000	16	26.776.828	47	22	36	144.775.659	106	121
4.01.4.05.01.30.18	Monitoring dan inspeksi mendadak PNS	Jumlah OPD yang dimonitoring	55	50.000.000	50	38.203.500	90%	30.000.000	50	5.830.000	5.556	19	100	44.033.500	182	88
4.01.4.05.01.30.19	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah file kepegawaian yang tercoding	4.000	80.000.000	4000	39.669.398	4.000	55.000.000	2.492	12.619.421	62	23	6.492	52.288.819	162	65
4.01.4.05.01.30.21	Seleksi Penerimaan Praja IPDN		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4.01.4.05.01.30.22	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar	300	75.000.000	200	9.913.700	300	75.000.000	136	9.290.580	0	0	336	19.204.280	112	26
4.01.4.05.01.30.23	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Jumlah ASN yang memasuki purna tugas	40	220.000.000	40	151.646.250	40	120.000.000	40	114.615.500	100	96	80	266.261.750	200	121
4.01.4.05.01.30.24	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II	25	30.000.000	26	37.635.600	25	30.000.000	9	11.179.000	36	37	35	48.814.600	140	163
4.01.4.05.01.30.25	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang lulus ujian PI	50	40.000.000	65	31.412.500	45	35.000.000	21	5.433.000	47	16	86	36.845.500	172	92
4.01.4.05.01.30.26	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Jumlah SK KP yang ditetapkan	1.500	175.000.000	1264	114.112.659	1.700	120.000.000	700	46.282.133	41	39	1.964	160.394.792	131	92
4.01.4.05.01.30.27	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	725	75.000.000	713	39.088.651	750	65.000.000	500	13.139.500	67	20	1.213	52.228.151	167	70
4.01.4.05.01.30.28	Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjarangan gaji	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	2.500	65.000.000	1684	15.483.750	375	50.000.000	200	0	53	0	1.884	15.483.750	75	24
4.01.4.05.01.30.31	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	700	149.655.000	222	52.272.500	700	149.655.000	81	0	12	0	303	52.272.500	43	35
4.01.4.05.01.30.34	Pemutakhiran data SIMPEG	Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat	10.133	150.000.000	10754	42.654.234	10.133	75.000.000	5.371	21.304.000	53	28	16.125	63.958.234	159	43

4.01.4.05.01.30.3 8	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	1	100.000.000	1	93.453.313	1	100.000.000	1	23.380.723	100	23	2	116.834.036	200	117
4.01.4.05.01.30.4 1	Uji Kompetensi Jabatan	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	100	750.000.000	287	484.330.425	54	575.345.000	126	138.515.000	233	24	413	622.845.425	413	83
4.01.4.05.01.30.4 2	Seleksi Penerimaan Calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)	Jumlah Formasi CPNS	50	250.000.000	0	-	50	250.000.000	0	6.153.657	0	2	0	6.153.657	0	2
4.01.4.05.01.30.4 3	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, JKK, Ijin Cuti dan Taspen yang selesai	1.112	40.000.000	260	34.566.048	1.112	40.000.000	54	8.425.500	5	21	314	42.991.548	28	107
4.01.4.05.01.30.4 4	Penyusunan Formasi Kepegawaian	Jumlah dokumen penyusunan formasi	1	50.000.000	1	48.829.663	1	50.000.000	1	29.905.917	100	60	2	78.735.580	200	157
4.01.4.05.01.30.3 6	Evaluasi Kinerja Pegawai	Nilai IPP Kabupaten Klaten	52	75.000.000	15	28.064.250	0	6.775.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari tabel 2.1 tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan triwulan II dapat disimpulkan:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Indikator Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai 52 % dari target 10.481 sudah direalisasikan 5.407;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Indikator Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur mencapai 66% dari target 122 sudah direalisasikan 80;
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Jumlah Laporan Triwulan Tepat Waktu mencapai 25% dari target 4 sudah direalisasikan 1 laporan;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan indikator:
  - 1) Jumlah PNS yang diklat kepemimpinan tingkat II mencapai 0% dari target 2 orang;
  - 2) Jumlah PNS yang diklat kepemimpinan tingkat III mencapai 27% dari target 30 orang;
  - 3) Jumlah PNS yang diklat kepemimpinan tingkat IV mencapai 80% dari target 40 orang;
  - 4) Jumlah PNS yang berprestasi (mendapatkan satya lencana) mencapai 261% dari target 75 Orang sudah direalisasikan 196 orang;
  - 5) Jumlah PNS yang mendapat pembekalan pension mencapai 100% dari target 100 orang;
  - 6) Jumlah PNS yang diklat teknis tugas dan fungsi mencapai 141% dari target 96 orang terkirim 148 Orang;
  - 7) Jumlah PNS yang diklat fungsional mencapai 0% dari target 100 orang belum ada yang terkirim.
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan indicator:
  - 1) Jumlah PNS yang terupdate mencapai 41 % dari target 12.980 sudah direalisasikan 5.371 data;
  - 2) Jumlah kasus pelanggaran disiplin dan perceraian mencapai 27 % dari target 59 sudah tertangani 16 kasus;
  - 3) Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS mencapai 41 % dari target 1.700 SK sudah tertangani 700 SK.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

### 2.2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BKPPD didasarkan pada indikator kinerja yang dikaji sesuai dengan tugas dan fungsi BKPPD masih belum sesuai dengan target yang ingin dicapai, hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran ASN terhadap kewajiban dalam melaksanakan tugas.

#### 1. Gap Kompetensi

Gap Kompetensi terjadi karena adanya gap antara kompetensi yang dimiliki ASN yang terdiri dari pendidikan, pelatihan, pengalaman dan administrasi dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing ASN. Apakah kompetensi yang dimiliki ASN sudah sesuai atau belum dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, apabila belum sesuai maka akan terjadi gap. Untuk menghitung Gap Kompetensi adalah sebagai berikut :  $(0,25 \times A) + (0,25 \times B) + (0,25 \times C) + (0,25 \times D)$  dimana A adalah kompetensi pendidikan, B adalah kompetensi Pelatihan, C adalah kompetensi pengalaman dan D adalah kompetensi administrasi. Gap Kompetensi pada tahun 2017 adalah 0,31 yang artinya masih di atas target yang ditetapkan yaitu 0,30, hal ini dikarenakan masih banyak ASN yang belum mengikuti bintek maupun pelatihan.

#### 2. Kinerja

Penilaian Kinerja didasarkan pada penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing-masing ASN, dimana tugas-tugas yang dilaksanakan oleh ASN sudah sesuai atau belum dengan target yang ditentukan, yang terdiri dari kuantitas/output, kualitas/mutu, waktu dan biaya.

Kinerja juga masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 84,10 dari target yang ditetapkan 84,15. Hal ini dikarenakan masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga berpengaruh pada hasil penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

#### 3. Indisipliner

Penilaian disiplin dihitung berdasarkan jumlah total bobot pelanggaran disiplin dibagi jumlah ASN yang dapat dirumuskan sebagai berikut :  $(JA + JB + JC) / JP$

Keterangan :

JA = Jumlah bobot pelanggaran disiplin berat

JB = Jumlah bobot pelanggaran disiplin sedang

JC = Jumlah bobot pelanggaran disiplin ringan

Disiplin berat mempunyai bobot 3

Disiplin sedang mempunyai bobot 2

Disiplin ringan mempunyai bobot 1

Pembinaan ASN terhadap pelanggaran disiplin dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2 bahwa penilaian indisipliner sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 0,29.

## 2.2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 2 bahwa manajemen PNS meliputi :

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan
2. Pengadaan
3. Pangkat dan Jabatan
4. Pengembangan karier
5. Pola karier
6. Promosi
7. Mutasi
8. Penilaian kinerja
9. Penggajian dan tunjangan
10. Penghargaan Disiplin
11. Pemberhentian
12. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
13. Perlindungan

Terkait dengan hal tersebut di atas bahwa tingkat pelayanan BKPPD dapat berjalan dengan baik, namun demikian perlu adanya perbaikan sesuai dengan regulasi yang setiap saat terus berkembang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD masih terdapat permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil identifikasi ada permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPPD, diantaranya adalah :

### 1. Permasalahan Bidang Pelayanan Kesekretariatan

Beberapa Permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Kesekretariatan, sebagai berikut:

- a. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (gudang penyimpanan berkas dan perlengkapan/peralatan)
- b. Tidak tersedianya ruangan yang representatif
- c. Tidak tersedianya ruang pertemuan yang representatif

- d. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur
2. Permasalahan Bidang Pelayanan Mutasi
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi, sebagai berikut:
- a. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK on line ke BKN.
  - b. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi
  - c. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD berkaitan dengan proses kenaikan pangkat
  - d. Belum disusunnya standar kompetensi jabatan ASN
  - e. Belum tersusunnya kelompok rencana suksesi
  - f. Belum tersusunnya pola karier
  - g. Belum tersusunnya rencana mutasi
  - h. Penempatan pegawai dalam jabatan tidak sesuai kompetensi
3. Permasalahan Bidang Pelayanan Pengembangan
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pengembangan, sebagai berikut :
- a. Masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang persyaratan izin belajar
  - b. Kurang maksimalnya pembinaan jabatan fungsional
  - c. Belum tersusunnya rencana pengembangan pegawai
  - d. Belum tersusunnya pemetaan pegawai dan rencana redistribusi PNS
  - e. Belum tersusunnya rencana kebutuhan diklat.
4. Permasalahan Bidang Pelayanan Umum
- Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data, sebagai berikut:
- a. Ruang Arsip kepegawaian kurang memadai
  - b. Lemahnya sistem informasi kepegawaian
  - c. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja/SKPD dan BKN
  - b. Kinerja PNS rendah dan tidak disiplin

Dengan adanya permasalahan tersebut, hal ini bisa menjadi tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPPD. Adapun tantangan dan peluang dapat digambarkan melalui analisa SWOT adalah sebagai berikut :

## 1. Identifikasi Faktor Internal

Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi kekuatan maupun kelemahan yang ada di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

### a. Kekuatan ( Strength)

- 1). Tersedianya pegawai yang cukup
- 2). Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi
- 3). Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKPPD.

### b. Kelemahan (Weaknesess)

- 1). Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai
- 2). Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKPPD untuk pengembangan ke depan
- 3). Data pegawai masih bersifat manual.

## 2. Identifikasi Faktor Eksternal

Analisa ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi peluang maupun ancaman yang datang dari luar lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten.

### a. Peluang (Opportunity)

- 1). Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur
- 2). Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran

### b. Tantangan (Threat)

- 1). Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan
- 2). Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur

Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telaahan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi BKPPD adalah:

1. Adanya PNS yang terlibat masalah hukum;
2. Masih ada praktek gratifikasi dan birokratisasi dalam pelayanan publik;
3. Tingkat ketidakhadiran masih relatif tinggi dan tingkat pemenuhan jam kerja masih rendah;
4. Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi;

5. Anggaran pemerintah pusat kelebihan jumlah pegawai;
6. Kinerja pengelola keuangan belum optimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Kapasitas aparat kewilayahan (kuantitas dan kualitas).



## BAB III

### PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2018 berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2018 dan pagu indikatif disajikan dalam dalam tabel 4.1:

Tabel. 4.1

Rencana Perubahan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

<b>Jumlah</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Setelah</b>	<b>Prakiraan Maju</b>
Program	6	6	6
Kegiatan	42	40	44
Pagu Indikatif	7.419.100.000	10.813.367.500	9.558.000.000

Rencana program dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah tahun 2018 dan pagu indikatif disajikan secara rinci dalam dalam tabel 4.2:

**Tabel 4.2**  
**RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PADA PERUBAHAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TAHUN 2018**  
**KABUPATEN KLATEN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Pagu Indikatif Prakiraan Maju 2019	Ket
		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(6)			(8)	(9)
<b>4.01.4.05.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>60%</b>	<b>10593</b>	<b>475.000.000</b>	<b>506.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	<b>618.000.000</b>	
4.01.4.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	Jumlah Surat Masuk & Surat Keluar	8850 Surat	8851 Surat	20.000.000	20.000.000	-	23.000.000	
4.01.4.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia di BKPPD	Jumlah Jenis ATK yang tersedia di BKPPD	71 Jenis	71 Jenis	65.000.000	46.000.000	(19.000.000)	47.000.000	
4.01.4.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 Barang	11 Barang	60.000.000	50.000.000	(10.000.000)	56.000.000	
4.01.4.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	Jumlah makanan minuman lembur dan jumlah makanan minuman rapat	1220 OK	1370 OK	80.000.000	90.000.000	10.000.000	92.000.000	BERTAMBAHNYA RAKOR KEPEGAWAIAN
4.01.4.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD keluar daerah	Jumlah SPPD keluar daerah	200000000Rp	111 Kegiatan	200.000.000	250.000.000	50.000.000	350.000.000	
4.01.4.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	500000000Rp	179 Kegiatan	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	
<b>4.01.4.05.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>Jumlah Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>60%</b>	<b>130</b>	<b>324.000.000</b>	<b>288.000.000</b>	<b>(36.000.000)</b>	<b>260.000.000</b>	
4.01.4.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung yang dibeli	Jumlah perlengkapan gedung yang diadakan	6 Unit	6 Unit	40.000.000	40.000.000	-	20.000.000	AC 1, MICKROFON 2
4.01.4.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	Jumlah peralatan gedung yang dibeli	6 Unit	10 Unit	40.000.000	86.000.000	46.000.000	50.000.000	1 PC, 2 PRINTER, 2 FINJERPRINT

4.01.4.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	17 Kendaraan	19 Kendaraan	65.000.000	65.000.000	-	70.000.000	
4.01.4.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12 Unit	12 Unit	24.000.000	12.000.000	(12.000.000)	30.000.000	
4.01.4.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	Jumlah peralatan gedung yang terpelihara	89 Unit	85 Unit	150.000.000	85.000.000	(65.000.000)	90.000.000	UNTUK JARINGAN
4.01.4.05.01.02.29	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang terpelihara		1 Paket	0	5.000.000	-	(5.000.000)	-	
<b>4.01.4.05.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan tepat waktu</b>	<b>60%</b>	<b>1</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000</b>	
4.01.4.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	1 Set Laporan	1 Set Laporan	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	
<b>4.01.4.05.01.27</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perencanaan</b>	<b>Meningkatnya kualitas perencanaan</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Renstra PD dan Renja PD tepat waktu</b>	<b>60%</b>	<b>3</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000</b>	
4.01.4.05.01.27.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Perubahan 2017 & 2018 murni) yang disusun dengan baik	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Perubahan 2017 & 2018 murni) yang disusun dengan baik	2 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	
4.01.4.05.01.27.02	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program/ Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan	6 Laporan	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	
<b>4.01.4.05.01.29</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur</b>	<b>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>3.798.100.000</b>	<b>4.565.000.000</b>	<b>766.900.000</b>	<b>5.790.000.000</b>	
4.01.4.05.01.29.01	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti prajabatan	125 CPNS	121 CPNS	1.212.500.000	500.000.000	(712.500.000)	600.000.000	CPNSUMUM 2 TERNYATA TIDAK ADA, 123 THL TAPI 1 MENINGGAL 1 MENGUNDURKAN DIRI

4.01.4.05.01.29.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklat Pim	72 Orang	50 Orang	1.545.600.000	1.625.000.000	79.400.000	1.850.000.000	
4.05.4.05.01.29.03	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	248 Orang	460 Orang	350.000.000	1.800.000.000	1.450.000.000	1.600.000.000	Diklat lakip 50, evajab 60, manajemen kepegawaian 40, PBJ 60
4.01.4.05.01.29.04	Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	100 Orang	230 Orang	450.000.000	550.000.000	100.000.000	750.000.000	Diklat Penyusun dan perancang perundang-undangan @42jt, diklat Inspektorat @20 = 10 Orang
4.01.4.05.01.29.06	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Diklat	35%	0	150.000.000	-	(150.000.000)	90.000.000	
4.05.4.05.01.29.07	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	60 Orang	0	90.000.000	-	(90.000.000)	900.000.000	dialihkan ke bintek perundang-undangan
4.05.4.05.01.29.08	Bintek Perundang-undangan Kepegawaian		Jumlah ASN yang dikirim mengikuti Bintek/Diklat	0	58 Orang	-	90.000.000	90.000.000		kegiatan baru (DULU BINTEK PERCERAIAN)
<b>4.01.4.05.01.30</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Terlaksananya Pembinaan Disiplin dan Pengembangan Karier Aparatur</b>	<b>Prosentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>2.797.000.000</b>	<b>5.429.367.500</b>	<b>2.647.367.500</b>	<b>2.865.000.000</b>	
4.01.4.05.01.30.01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Jumlah Data Kepangkatan PNS	Jumlah Data Kepangkatan PNS	1 Set Laporan	0	15.000.000	-	(15.000.000)	20.000.000	
4.01.4.05.01.30.03	Penempatan PNS	Jumlah ASN yang ditempatkan	Jumlah ASN yang ditempatkan	1764 ASN	2500 ASN	500.000.000	1.353.000.000	853.000.000	245.000.000	untuk sewa gedung, uji gagasan eselon II, pengisian dan rotasi
4.01.4.05.01.30.05	Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat	Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibuat	2 Aplikasi	6 Aplikasi	180.000.000	180.000.000	-	60.000.000	2 aplikasi menjadi 6 aplikasi
4.01.4.05.01.30.08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana	Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan satya lencana	75 ASN Kab.Klaten	75 ASN Kab.Klaten	22.000.000	22.000.000	-	25.000.000	

4.01.4.05.01.30.09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan	Jumlah Pelanggaran disiplin, izin perceraian & izin keterangan perceraian yang diselesaikan	59 Kasus/ Ijin	34 Kasus/ Ijin	90.000.000	120.000.000	30.000.000	70.000.000	
4.01.4.05.01.30.18	Monitoring dan inspeksi mendadak PNS	Prosentase tingkat kehadiran ASN kabupaten klaten	Jumlah OPD yang dimonitoring	90%	50 SKPD	50.000.000	30.000.000	(20.000.000)	50.000.000	
4.01.4.05.01.30.19	Pengelolaan Arsip Kepegawaian	Jumlah file kepegawaian yang tercoding	Jumlah file kepegawaian yang tercoding	4000 File Kepegawaian	4000 File Kepegawaian	50.000.000	77.500.000	27.500.000	80.000.000	Pengadaan Map File
4.01.4.05.01.30.21	Seleksi Penerimaan Praja IPDN	Jumlah Praja IPDN		20 Orang	0	15.000.000	-	(15.000.000)	75.000.000	
4.01.4.05.01.30.22	Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar	Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar	Jumlah ASN yang tugas belajar & izin penggunaan gelar	154 PNS	200 PNS	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	
4.01.4.05.01.30.23	Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas	Jumlah ASN yang memasuki purna tugas	Jumlah ASN yang memasuki purna tugas	100 PNS	40 PNS	120.000.000	120.000.000	-	120.000.000	
4.01.4.05.01.30.24	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II	Jumlah ASN yang lulus ujian dinas tingkat I & II	27 PNS	25 PNS	30.000.000	30.000.000	-	45.000.000	
4.01.4.05.01.30.25	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah ASN yang lulus ujian PI	Jumlah ASN yang lulus ujian PI	45 ASN	45 ASN	35.000.000	57.000.000	22.000.000	35.000.000	
4.01.4.05.01.30.26	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap	Jumlah SK KP yang ditetapkan	Jumlah SK KP yang ditetapkan	1700 SK	1700 SK	120.000.000	135.000.000	15.000.000	120.000.000	makan minum untuk penyerahan SK dan honor TIM
4.01.4.05.01.30.27	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	Jumlah SK Pensiun yang ditetapkan	750 SK	750 SK	70.000.000	84.000.000	14.000.000	65.000.000	
4.01.4.05.01.30.28	Pengangkatan CPNS ke PNS dan penjarangan gaji	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	Jumlah CPNS/PNS yang mengangkat sumpah janji & penjarangan gaji	375 SK	375 SK	75.000.000	55.000.000	(20.000.000)	75.000.000	
4.01.4.05.01.30.31	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	Jumlah penyelenggara negara yang melaporkan LHKPN	800 Pejabat Penyelenggara	700 Pejabat Penyelenggara	100.000.000	149.655.000	49.655.000	100.000.000	
4.01.4.05.01.30.34	Pemutakhiran data SIMPEG	Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat	Jumlah data ASN yang lengkap serta akurat	10133 PNS	10133 PNS	60.000.000	97.500.000	37.500.000	75.000.000	Untuk Rakor
4.01.4.05.01.30.38	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	Jumlah Laporan Jabatan Fungsional bagi PNS Kabupaten Klaten	11 PNS	1 Set Laporan	100.000.000	125.000.000	25.000.000	160.000.000	Untuk fasilitasi impasing

4.01.4.05.01.30.41	Uji Kompetensi Jabatan	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	1400 Orang	54 Calon JPT	1.000.000.000	825.712.500	(174.287.500)	1.000.000.000	untuk penyusunan SKJ dan uji kom Calon JPT 63 Orang, Calon Pengawas 117 Orang
4.01.4.05.01.30.42	Seleksi Penerimaan Calon PNS (Pengadaan CPNS Pelamar Umum)		Jumlah Formasi CPNS	0	700 Formasi	-	1.053.000.000	1.053.000.000	250.000.000	pelamar 12.000 dengan CAT
4.01.4.05.01.30.43	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian	Jumlah Karpeg, Karis, Karsu dan Taspen yang selesai	Jumlah Karpeg, Karis, Karsu, JKK, Ijin Cuti dan Taspen yang selesai	1112 Kartu	1112 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	
4.01.4.05.01.30.44	Penyusunan Formasi Kepegawaian	Jumlah laporan <i>bezetting</i> (formasi bagi PNS)	Jumlah dokumen penyusunan formasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	
4.01.4.05.01.30.36	Evaluasi Kinerja Pegawai		Jumlah Laporan IPP Kabupaten Klaten		1 Laporan		750.000.000	750.000.000	30.000.000	kegiatan baru
			Jumlah Finjerprint yang dibeli		88 Buah					
<b>JUMLAH</b>						<b>7.419.100.000</b>	<b>10.813.367.500</b>	<b>3.394.267.500</b>	<b>9.558.000.000</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten secara efektif dan efisien, selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUAP) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2018.

#### **1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah memiliki prioritas yakni mengirimkan peserta Pelatihan dan Pendidikan Struktural bagi PNS Daerah yang membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Pelatihan dan Pendidikan Struktural bagi PNS Daerah sudah merupakan agenda yang tidak bisa ditunda lagi mengingat beberapa peraturan perundangan terkait dengan manajemen PNS menuntut untuk itu diantaranya lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### **2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

- Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan triwulan II;
- Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki;
- Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.

#### **3. Rencana Tindak Lanjut**

Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindak lanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target dan harapan.

Klaten,

2018

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN DAERAH  
KABUPATEN KLATEN**

**SURTI HARTINI, SH. CN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630808 198903 2 010